



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

18/1

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp4.930.717.453.843,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp 4.827.915.855.843,00
b. Belanja		<u>Rp 4.930.717.453.843,00</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp (102.801.598.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		Rp 152.801.598.000,00
2. Pengeluaran		<u>Rp 50.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp 102.801.598.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan :		Rp. 0,00



Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 2.543.336.248.343,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp 2.282.650.195.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 1.929.412.500,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp 2.120.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 341.684.013.200,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 50.100.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 31.552.235.143,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp 2.282.650.195.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 1.929.412.500,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp 3.814.241.158.092,94
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp 406.457.966.034,06
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 50.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp 660.018.329.716,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 2.320.009.561.469,02
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.359.251.731.048,96
 - c. Belanja Subsidi Rp 300.000.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 120.948.067.661,96
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 13.731.797.913,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 87.314.927.816,00
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp 107.296.506.718,06
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp 189.649.206.000,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 22.197.325.500,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Terduga Rp 50.000.000.000,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil Rp 627.380.829.716,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 32.637.500.000,00

184

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp 152.801.598.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp 50.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas :

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; |
| e. Lampiran V | : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| g. Lampiran VII | : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD; |
| h. Lampiran VIII | : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; |
| i. Lampiran IX | : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi; |
| j. Lampiran X | : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. Lampiran XI | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| l. Lampiran XII | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| m. Lampiran XIII | : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| n. Lampiran XIV | : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| o. Lampiran XV | : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| p. Lampiran XVI | : Daftar Dana Cadangan; dan |
| q. Lampiran XVII | : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |

LSA

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **31 DESEMBER 2025**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

PROVINSI SULAWESI TENGAH

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.543.336.248.343,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.120.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	341.684.013.200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.100.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.552.235.143,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.282.650.195.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.282.650.195.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.929.412.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.929.412.500,00
	Jumlah Pendapatan	4.827.915.855.843,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.814.241.158.092,94
5.1.01	Belanja Pegawai	2.320.009.561.469,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.251.731.048,96
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	120.948.067.661,96
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.731.797.913,00
5.2	BELANJA MODAL	406.457.966.034,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.314.927.816,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.296.506.718,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.649.206.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.197.325.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	660.018.329.716,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	627.380.829.716,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	32.637.500.000,00
	Jumlah Belanja	4.930.717.453.843,00
	Total Surplus/(Defisit)	-102.801.598.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

18/09/25

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.801.598.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.801.598.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	152.801.598.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	102.801.598.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **44** TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

FM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.543.336.248.343,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.282.650.195.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 1.929.412.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 4.827.915.855.843,00

2. Belanja:

a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp 2.320.009.561.469,02
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.359.251.731.048,96
3) Belanja Subsidi	Rp 300.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp 120.948.067.661,96
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.731.797.913,00
	Rp 3.814.241.158.092,94

F m g

b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	87.314.927.816,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	107.296.506.718,06
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	189.649.206.000,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp</u>	<u>22.197.325.500,00</u>
	Rp	406.457.966.034,06
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp	50.000.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	627.380.829.716,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>32.637.500.000,00</u>
	<u>Rp</u>	<u>660.018.329.716,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	4.930.717.453.843,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(102.801.598.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	152.801.598.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>50.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	102.801.598.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

FA 7

- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,



PROVINSI SULAWESI TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.543.336.248.343,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.120.000.000.000,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	230.000.000.000,00
4.1.01.01.001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.177.729.578,00
4.1.01.01.001.00002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.177.729.578,00
4.1.01.01.002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	14.092.920.372,00
4.1.01.01.002.00002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	14.092.920.372,00
4.1.01.01.003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	107.272.015.893,00
4.1.01.01.003.00002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	107.272.015.893,00
4.1.01.01.004	PKB-Mobil Bus-Microbus	591.843.564,00
4.1.01.01.004.00002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	591.843.564,00
4.1.01.01.005	PKB-Mobil Bus-Bus	51.656.623,00
4.1.01.01.005.00002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	51.656.623,00
4.1.01.01.006	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	28.819.593.418,00
4.1.01.01.006.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	28.819.593.418,00
4.1.01.01.007	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	16.352.643.494,00
4.1.01.01.007.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	16.352.643.494,00
4.1.01.01.008	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.905.906.511,00
4.1.01.01.008.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	4.905.906.511,00
4.1.01.01.009	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	336.379.674,00
4.1.01.01.009.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	336.379.674,00
4.1.01.01.010	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	56.334.006.494,00
4.1.01.01.010.00002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	56.334.006.494,00
4.1.01.01.011	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	65.304.379,00
4.1.01.01.011.00002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	65.304.379,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	250.000.000.000,00
4.1.01.02.001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	417.470.130,00
4.1.01.02.001.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	417.470.130,00
4.1.01.02.002	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	12.637.417.221,00
4.1.01.02.002.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	12.637.417.221,00
4.1.01.02.003	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	84.275.472.252,00
4.1.01.02.003.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	84.275.472.252,00
4.1.01.02.004	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.266.024.856,00

FMY



PROVINSI SULAWESI TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.543.336.248.343,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.120.000.000.000,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	230.000.000.000,00
4.1.01.01.001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.177.729.578,00
4.1.01.01.001.00002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.177.729.578,00
4.1.01.01.002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	14.092.920.372,00
4.1.01.01.002.00002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	14.092.920.372,00
4.1.01.01.003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	107.272.015.893,00
4.1.01.01.003.00002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	107.272.015.893,00
4.1.01.01.004	PKB-Mobil Bus-Microbus	591.843.564,00
4.1.01.01.004.00002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	591.843.564,00
4.1.01.01.005	PKB-Mobil Bus-Bus	51.656.623,00
4.1.01.01.005.00002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	51.656.623,00
4.1.01.01.006	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	28.819.593.418,00
4.1.01.01.006.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	28.819.593.418,00
4.1.01.01.007	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	16.352.643.494,00
4.1.01.01.007.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	16.352.643.494,00
4.1.01.01.008	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.905.906.511,00
4.1.01.01.008.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	4.905.906.511,00
4.1.01.01.009	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	336.379.674,00
4.1.01.01.009.00002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	336.379.674,00
4.1.01.01.010	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	56.334.006.494,00
4.1.01.01.010.00002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	56.334.006.494,00
4.1.01.01.011	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	65.304.379,00
4.1.01.01.011.00002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	65.304.379,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	250.000.000.000,00
4.1.01.02.001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	417.470.130,00
4.1.01.02.001.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	417.470.130,00
4.1.01.02.002	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	12.637.417.221,00
4.1.01.02.002.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	12.637.417.221,00
4.1.01.02.003	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	84.275.472.252,00
4.1.01.02.003.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	84.275.472.252,00
4.1.01.02.004	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.266.024.856,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.02.004.00001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.266.024.856,00
4.1.01.02.005	BBNKB-Mobil Bus-Bus	241.265.205,00
4.1.01.02.005.00001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	241.265.205,00
4.1.01.02.006	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	30.847.729.352,00
4.1.01.02.006.00001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	30.847.729.352,00
4.1.01.02.007	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.390.365.280,00
4.1.01.02.007.00001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.390.365.280,00
4.1.01.02.008	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.407.834.570,00
4.1.01.02.008.00001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.407.834.570,00
4.1.01.02.009	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	298.192.950,00
4.1.01.02.009.00001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	298.192.950,00
4.1.01.02.010	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	107.817.986.980,00
4.1.01.02.010.00001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	107.817.986.980,00
4.1.01.02.011	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	400.241.204,00
4.1.01.02.011.00001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	400.241.204,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.100.000.000.000,00
4.1.01.03.002	PBBKB-Bahan Bakar Solar	14.929.364,00
4.1.01.03.002.00001	PBBKB Bahan Bakar Solar	14.929.364,00
4.1.01.03.004	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	1.099.985.070.636,00
4.1.01.03.004.00001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	1.099.985.070.636,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	210.000.000.000,00
4.1.01.04.001	Pajak Air Permukaan	210.000.000.000,00
4.1.01.04.001.00001	Pajak Air Permukaan	210.000.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	260.000.000.000,00
4.1.01.05.001	Pajak Rokok	260.000.000.000,00
4.1.01.05.001.00001	Pajak Rokok	260.000.000.000,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	7.500.000.000,00
4.1.01.17.001	Pajak Alat Berat	7.500.000.000,00
4.1.01.17.001.00001	Pajak Alat Berat	7.500.000.000,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	62.500.000.000,00
4.1.01.18.001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	62.500.000.000,00
4.1.01.18.001.00001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	62.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	341.684.013.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	275.187.372.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	275.187.372.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	268.187.372.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	7.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	56.496.641.200,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.058.094.200,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	549.607.811,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.420.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	664.532.995,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.959.279.675,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.582.940.975,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	36.300.312.744,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	3.778.709.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.778.709.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.000.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.000.000.000,00
4.1.02.02.010	Retribusi Penyeberangan di Air	600.000.000,00
4.1.02.02.010.00002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	600.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.812.308.000,00
4.1.02.02.011.00001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.587.308.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	2.120.000.000,00
4.1.02.02.011.00004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	105.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	15.030.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	15.030.000,00
4.1.02.02.016	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	132.500.000,00
4.1.02.02.016.00001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	132.500.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.100.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	50.000.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	50.000.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	50.000.000.000,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	100.000.000,00
4.1.03.03.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	100.000.000,00
4.1.03.03.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.552.235.143,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.594.800,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.050.594.800,00
4.1.04.01.002.00055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.050.594.800,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.327.200,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	530.327.200,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	530.327.200,00
4.1.04.05	Jasa Giro	20.000.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	20.000.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	20.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000.000,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.000.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.971.313.143,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.101.414.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.101.414.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	869.899.143,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	279.303.000,00
4.1.04.16.006.00004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	590.596.143,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.282.650.195.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.282.650.195.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	422.948.133.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	125.778.191.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	47.280.695.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	78.222.822.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	274.674.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	293.553.972.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	74.069.286.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	215.082.506.000,00
4.2.01.07.002.00007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	507.181.000,00
4.2.01.07.002.00008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3.894.999.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	3.615.970.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	3.615.970.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.304.354.683.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.257.395.894.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	1.257.395.894.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	46.958.789.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	28.466.395.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.492.394.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	555.347.379.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	13.012.807.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	13.012.807.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	542.334.572.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	218.400.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.200.000.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.364.960.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	195.025.810.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.729.000.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	335.486.376.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	121.500.000,00
4.2.01.09.002.00038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	1.780.526.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.929.412.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.929.412.500,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.929.412.500,00
4.3.01.04.003	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.929.412.500,00
4.3.01.04.003.00001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.929.412.500,00
	Jumlah Pendapatan	4.827.915.855.843,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.814.241.158.092,94
5.1.01	Belanja Pegawai	2.320.009.561.469,02
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.595.113.281.671,12
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	1.280.625.588.049,86
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	829.884.869.619,37
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	450.740.718.430,49
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.407.911.694,80
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	55.874.554.090,64
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.533.357.604,16
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.066.679.900,80
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.066.679.900,80

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.615.326.730,55
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34.540.317.601,41
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	75.009.129,14
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.264.594.530,89
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.251.038.197,24
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25.013.556.333,65
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.692.084.658,86
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32.660.466.544,96
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	23.031.618.113,90
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.228.684.833,48
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.228.684.833,48
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.301.758.374,88
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.764.771.900,61
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	536.986.474,27
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	70.000.000.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	70.000.000.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.910.652.897,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.910.652.897,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	670.075.936.713,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	23.452.945.421,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23.452.945.421,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	290.653.777,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	290.653.777,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	52.717.509,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	52.717.509,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	272.501.218.006,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	272.501.218.006,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	373.778.402.000,00
5.1.01.02.006.00001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	7.008.000.000,00
5.1.01.02.006.00002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.950.000.000,00
5.1.01.02.006.00003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.791.000.000,00
5.1.01.02.006.00004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	3.621.000.000,00
5.1.01.02.006.00005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok	20.000.000,00
5.1.01.02.006.00022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00
5.1.01.02.006.00029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
5.1.01.02.006.00045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	335.486.376.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.780.526.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	121.500.000,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.865.461.499,92
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	247.857.620,52
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	247.857.620,52
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	205.846.890,80
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	205.846.890,80
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	179.588.246,73
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	179.588.246,73
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	285.381.658,74
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	285.381.658,74
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.397.897,39
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.397.897,39
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	10.151.442.517,95
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	10.151.442.517,95
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.537.860.629,49
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.537.860.629,49
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.551.253.386,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.551.253.386,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.495.553.796,23
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	539.981.968,84
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	157.654.978,50
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.797.916.848,89
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	12.858.493.856,07
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	12.858.493.856,07
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.065.583,09
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	86.949.873,74
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	86.949.873,74

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.991.619,97
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.991.619,97
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	143.024.596,49
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	143.024.596,49
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.476.444,72
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.476.444,72
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.620.726,85
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.620.726,85
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.321,32
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.321,32
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.421.146.861,89
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	369.143.364,29
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	369.143.364,29
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.052.003.497,60
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.052.003.497,60
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	9.280.669.140,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	9.280.669.140,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	9.280.669.140,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.251.731.048,96
5.1.02.01	Belanja Barang	304.723.535.965,30
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	304.598.639.965,30
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.420.000,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.844.339.539,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.178.885.313,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.098.042.442,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.507.835.458,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	53.280.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	94.052.940,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.955.527.211,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	40.614.000,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	94.370.250,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.822.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.600.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.324.430.706,22
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.152.434.306,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.620.079.390,48

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.950.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.911.219.296,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	869.927.511,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	608.976.883,61
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	741.058.113,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.100.581.576,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	67.360.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	572.059.623,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	976.777.709,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	359.750.241,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	219.335.663.588,99
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.051.259.774,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	652.566.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.942.091.094,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.598.440.000,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.520.925.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.370.625.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	863.675.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	124.896.000,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.896.000,00
5.1.02.01.004.00248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	70.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	375.624.664.096,83
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	260.257.123.250,03
5.1.02.02.001.00002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	294.850.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.524.450.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.497.550.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	349.400.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.475.300.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	30.430.716.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	68.590.000,00
5.1.02.02.001.00010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	56.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	379.896.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	838.518.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	236.834.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.509.620.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	42.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	96.900.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	392.800.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.301.439.595,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.929.111.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.448.503.794,29
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.694.070.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.411.800.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	120.000.000,00
5.1.02.02.001.00036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	269.200.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	273.100.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.360.000.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.363.600,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.725.000.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.087.103.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	159.643.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.000.000,00
5.1.02.02.001.00054	Belanja Jasa Jalan/Tol	7.200.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.718.907.500,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	292.985.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	217.043.358,39
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	31.017.638.494,23
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	233.680.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.755.339.806,12
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	77.159.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.947.473.202,00
5.1.02.02.001.00069	Belanja Pengolahan Air Limbah	26.148.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	820.845.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	238.155.900,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.418.330.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	384.360.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	5.810.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	418.600.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	7.798.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	406.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	35.154.000.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	1.436.400.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	57.035.300.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	71.918.127.500,00
5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	30.600.854.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.080.286.000,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	630.587.500,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.606.400.000,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00
5.1.02.02.003.00018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	5.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.684.862.000,00
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.189.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.156.620.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	75.000.000,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	503.500.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	524.342.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.900.000,00
5.1.02.02.004.00410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	96.000.000,00
5.1.02.02.004.00462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya	13.500.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.702.650.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	705.000.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.828.900.000,00
5.1.02.02.005.00033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	90.000.000,00
5.1.02.02.005.00042	Belanja Sewa Asrama	48.750.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.056.901.346,80
5.1.02.02.008.00001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	36.000.000,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	18.867.581.146,15
5.1.02.02.008.00004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	35.964.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	654.235.000,00
5.1.02.02.008.00006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.846.928.486,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	54.570.456,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	175.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.426.482.258,65
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.625.000.000,00
5.1.02.02.008.00021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	3.185.140.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	50.081.495.969,31
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.189.641.054,01
5.1.02.03.001.00001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	530.234.054,01
5.1.02.03.001.00004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	144.607.000,00
5.1.02.03.001.00029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	514.800.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.458.366.927,00
5.1.02.03.002.00001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	2.000.000,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.497.000.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	287.500.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00
5.1.02.03.002.00043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	48.000.000,00
5.1.02.03.002.00061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	125.230.000,00
5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.500.000,00
5.1.02.03.002.00069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	2.350.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.191.350.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.085.002.997,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	802.882.430,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	45.510.000,00
5.1.02.03.002.00248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	500.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	267.785.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	49.452.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	76.100.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	410.704.500,00
5.1.02.03.002.00492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.695.649.130,30
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.055.877.130,30
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00
5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	402.457.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.715.500,00
5.1.02.03.003.00050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.176.599.500,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.737.838.858,00
5.1.02.03.004.00002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	19.593.300.000,00
5.1.02.03.004.00012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	741.224.000,00
5.1.02.03.004.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	11.755.314.858,00
5.1.02.03.004.00029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00
5.1.02.03.004.00052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.648.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.517.761.026,52
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.517.761.026,52
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.695.735.026,52
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	193.200.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.810.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	616.016.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	157.477.600.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	157.477.600.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.444.600.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	155.033.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	157.993.908.600,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	157.993.908.600,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	147.746.508.600,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	10.247.400.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	248.832.765.391,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	248.832.765.391,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	248.832.765.391,00
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	300.000.000,00
5.1.04.01.001	Belanja Subsidi kepada BUMN	300.000.000,00
5.1.04.01.001.00001	Belanja Subsidi kepada BUMN	300.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	120.948.067.661,96
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.696.946.061,96
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.392.921.266,96
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.392.921.266,96
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.441.602.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.349.755.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	91.847.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	53.262.422.795,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.235.589.400,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.026.833.395,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.971.951.600,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.971.951.600,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.971.951.600,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	41.279.170.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	41.279.170.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	41.279.170.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.731.797.913,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.981.797.913,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	9.020.000.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	9.020.000.000,00
5.1.06.02.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.961.797.913,00
5.1.06.02.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.961.797.913,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.1.06.03.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.1.06.03.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.750.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.750.000.000,00
5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.750.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	406.457.966.034,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.314.927.816,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.593.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	12.593.000,00
5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	12.593.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.316.420.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.316.420.000,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.188.288.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.132.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	663.445.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	663.445.000,00
5.2.02.03.003.00005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	25.875.000,00
5.2.02.03.003.00007	Belanja Modal Universal Tester	637.570.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	14.599.050.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.599.050.000,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.214.250.000,00
5.2.02.04.001.00003	Belanja Modal Alat Panen	7.384.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.023.547.199,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	85.148.800,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.123.800,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	72.025.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.927.798.399,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	4.224.313.680,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.568.670,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	308.565.043,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	345.948.006,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	19.403.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.600.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	226.397.041,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	226.397.041,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.261.600,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	189.953.600,00
5.2.02.06.001.00005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	28.181.841,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.486.034.000,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.480.158.900,00
5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.480.158.900,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.875.100,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.875.100,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.615.085.000,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	297.170.000,00
5.2.02.08.001.00064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	297.170.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.810.690.000,00
5.2.02.08.003.00014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.810.690.000,00
5.2.02.08.007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.507.225.000,00
5.2.02.08.007.00002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	1.507.225.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.049.115.156,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	1.726.433.606,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	1.726.433.606,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	322.681.550,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.481.550,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	261.500.000,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	38.700.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	46.556.985.900,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	46.556.985.900,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	46.556.985.900,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.766.255.520,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.766.255.520,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.766.255.520,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.296.506.718,06
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	103.526.506.718,06
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.526.506.718,06
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	78.405.631.668,00
5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.402.807.000,00
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.600.000.000,02
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.118.068.050,04
5.2.03.01.001.00033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.770.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.770.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.770.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.649.206.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	176.863.776.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	158.463.776.000,00
5.2.04.01.001.00002	Belanja Modal Jalan Provinsi	158.463.776.000,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	18.400.000.000,00
5.2.04.01.002.00002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	18.400.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.145.000.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.945.000.000,00
5.2.04.02.004.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	11.945.000.000,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.2.04.02.006.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	130.430.000,00
5.2.04.04.003	Belanja Modal Jaringan Telepon	130.430.000,00
5.2.04.04.003.00001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	130.430.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	510.000.000,00
5.2.04.99.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	510.000.000,00
5.2.04.99.099.09999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	510.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.197.325.500,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	22.197.325.500,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	22.197.325.500,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	22.197.325.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	660.018.329.716,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	627.380.829.716,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	627.380.829.716,00
5.4.01.01.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	537.385.107.279,23
5.4.01.01.001.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	537.385.107.279,23
5.4.01.01.002	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	89.995.722.436,77
5.4.01.01.002.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	89.995.722.436,77

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	32.637.500.000,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00
5.4.02.02.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00
5.4.02.02.002.00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika	10.000.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	22.637.500.000,00
5.4.02.03.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.787.500.000,00
5.4.02.03.001.00001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.787.500.000,00
5.4.02.03.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	18.850.000.000,00
5.4.02.03.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	18.850.000.000,00
	Jumlah Belanja	4.930.717.453.843,00
	Total Surplus/(Defisit)	-102.801.598.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.801.598.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.801.598.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.801.598.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	52.801.598.000,00
6.1.01.02.001.00190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	52.801.598.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000.000,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	102.801.598.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd

ANWAR HAFID

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	32.637.500.000,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00
5.4.02.02.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00
5.4.02.02.002.00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika	10.000.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	22.637.500.000,00
5.4.02.03.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.787.500.000,00
5.4.02.03.001.00001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.787.500.000,00
5.4.02.03.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	18.850.000.000,00
5.4.02.03.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	18.850.000.000,00
	Jumlah Belanja	4.930.717.453.843,00
	Total Surplus/(Defisit)	-102.801.598.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.801.598.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.801.598.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.801.598.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	52.801.598.000,00
6.1.01.02.001.00190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	52.801.598.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000.000,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	102.801.598.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



 ANWAR HAFID